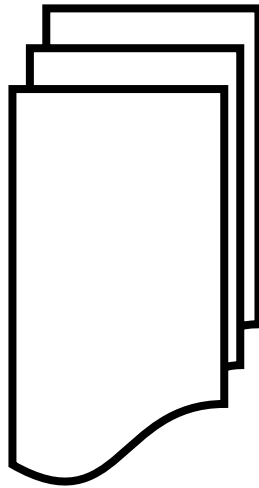


LPPD DINAS SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2024



KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2025

LPPD DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2024

I. PROGRAM DAN KEGIATAN

Penjabaran tugas pokok sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 24 Tahun 2017 telah dituangkan dalam RENSTRA Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024. Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao telah melaksanakan urusan wajib Pelayanan Dasar Sosial Pemerintahan Daerah yang dijabarkan dalam 5 (Lima) Program / 11 (Sebelas) Kegiatan/ 18 Sub Kegiatan yang dirinci sebagai berikut :

No	Program	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Pelaksana (Bidang/Bagian)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan	- Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat

		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2.	Pemberdayaan Sosial	7. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota a. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pemberdayaan Sosial
3.	Rehabilitasi Sosial	8. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial a. Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 9. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial a. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Bidang Rehabilitasi Sosial
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	10. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Penanganan Fakir Miskin

		b. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		c. Fasilitasi Pengembangan Masyarakat Bantuan Ekonomi	Bidang Penanganan Fakir Miskin
5.	Penanganan Bencana	11. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota a. Penyediaan Makanan	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

II. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial yang diwujudkan dalam 5 (Lima) Program / 11 (Sebelas) Kegiatan/18 Sub Kegiatan menggunakan dana sebesar **Rp. 2.473.711.883,-** (*Dua Milyard Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*) yang bersumber dari dana DAU Tahun Anggaran 2024 dan realisasinya sebesar **Rp. 2.148.782.606,-** (*Dua Milyard Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Rupiah*) (86,86 %) dengan rincian belanja :

a. Belanja Operasi **Rp. 2.473.711.883,-** (*Dua Milyard Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp. 2.148.782.606,-** (*Dua Milyard Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Rupiah*) (86,86 %) untuk membiayai pelaksanaan 5 (Lima) Program / 11 (Sebelas) Kegiatan/ 18 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, jumlah dana Rp.35.418.000,- yang terdiri dari 2 sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, jumlah dana Rp.25.018.000,-
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, jumlah dana Rp.10.400.000,-
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, jumlah dana Rp. 1.771.956.533,- yang terdiri dari 2 sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, jumlah dana Rp.1.720.156.533,-
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, jumlah dana Rp.51.800.000,-
 - 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, jumlah dana Rp.11.100.000,- dengan 1 sub kegiatan :
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, jumlah dana Rp.11.100.000,-
 - 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, jumlah dana Rp.50.577.100,- yang terdiri dari 3 sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, jumlah dana Rp. 500.000,-.
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, jumlah dana Rp. 6.197.100,-
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, jumlah dana Rp. 43.880.000,-
 - 1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, jumlah dana Rp.19.865.850,- yang terdiri dari 1 sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, jumlah dana Rp.19.865.850,-

- 1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, jumlah dana Rp. 104.550.000,- yang terdiri dari 2 sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, jumlah dana Rp. 103.950.000,-
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, jumlah dana Rp. 600.000,-
2. Program Pemberdayaan Sosial
 - 2.1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, jumlah dana Rp.32.340.000,- dengan 1 sub kegiatan :
 - a. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, jumlah dana Rp.32.340.000,-
3. Program Rehabilitasi Sosial
 - 3.1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial, jumlah dana Rp. 50.162.000,- yang terdiri dari 1 sub kegiatan :
 - a. Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat, jumlah dana Rp.20.000.000,-
 - 3.2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan Napza Di Luar Panti Sosial, jumlah dana Rp. 30.162.000,- dengan 1 sub kegiatan :
 - a. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial, jumlah dana Rp.30.162.000,-

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 4.1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, jumlah dana Rp. 122.689.400,- yang terdiri dari 3 sub kegiatan :
 - a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Daerah Kabupaten/Kota, jumlah dana Rp. 87.658.000,-
 - b. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, jumlah dana Rp. 17.227.400,-
 - c. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, jumlah dana Rp. 17.804.000,-
5. Program Penanganan Bencana
 - 5.1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota, jumlah dana Rp. 275.053.000,- dengan 1 sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Makanan, jumlah dana Rp. 275.053.000,-

2. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan

Jumlah anggaran untuk membiayai pelaksanaan Program/Kegiatan dengan sumber dana Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 2.473.711.883,-** dan realisasinya sebesar **Rp. 2.148.782.606,- (86,86%)**

Realisasi Anggaran yang dicapai pada Program/Kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar **Rp. 35.418.000,-**. Realisasi dana sebesar **Rp. 35.173.000,- (99,31 %)**.

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.018.000,-
Realisasi dana sebesar Rp. 24.998.000,- (99,92 %).
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.10.400.000,-
Realisasi dana sebesar Rp.10.175.000,- (97,84 %).

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.1.771.956.533,-
Realisasi dana sebesar Rp.1.514.503.604,- (85,47%).

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar
Rp.1.720.156.533,-Realisasi dana sebesar
Rp.1.462.703.604,- (85,03%)

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.51.800.000,-
Realisasi dana sebesar Rp.51.800.000,- (100%)

**3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada
Perangkat Daerah**

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar **Rp.11.100.000,-**.
Realisasi dana sebesar **Rp.11.100.000,- (100%)**.

a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.11.100.000,-
Realisasi dana sebesar Rp.11.100.000,- (100%)

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar **Rp.50.577.100,-**.
Realisasi dana sebesar **Rp.50.504.000,- (99,86%)**.

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 500.000,-
Realisasi dana sebesar Rp. 500.000,- (100%)

b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.6.197.100,-
Realisasi dana sebesar Rp.6.197.000,- (100%)

c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.43.880.000,-
Realisasi dana sebesar Rp.43.807.000,- (99,83%)

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar **Rp.19.865.850,-**.

Realisasi dana sebesar **Rp.19.642.101,- (98,87%)**.

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.19.865.850,-

Realisasi dana sebesar Rp.19.642.101,- (98,87%)

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar **Rp.104.550.000,-**.

Realisasi dana sebesar **Rp.102.879.350,- (98,40%)**.

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.103.950.000,-

Realisasi dana sebesar Rp.102.279.350,- (98,39%)

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.600.000,-

Realisasi dana sebesar Rp.600.000,- (100%)

II. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

8. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar **Rp.32.340.000,-**.

Realisasi dana sebesar **Rp.32.229.000,- (99,66%)**.

a. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.32.340.000,-

Realisasi dana sebesar Rp.32.340.000,- (99,66%)

III. PROGRAM REHABILITAS SOSIAL

9. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia

Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar **Rp. 20.000.000,-**

Realisasi dana sebesar **Rp. 19.741.000,- (98,71%)**

- a. Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.20.000.000,-

Realisasi dana sebesar Rp.19.741.000,- (98,71%).

10. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan Napza Di Luar Panti Sosial

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar **Rp.30.162.000,-**

Realisasi dana sebesar **Rp. 29.276.500,- (97,06%)**

- a. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.30.162.000,-

Realisasi dana sebesar Rp.29.276.500,- (97,06%).

IV. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

11. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar **Rp.122.689.400,-**

Realisasi dana sebesar **Rp.117.263.051,- (95,58%)**

- a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.87.658.000,-

Realisasi dana sebesar Rp.83.672.051,- (95,45%).

- b. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.17.227.400,-

Realisasi dana sebesar Rp.16.840.000,- (97,75%).

- c. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.17.804.000,-

Realisasi dana sebesar Rp.16.751.000,- (94,09%).

V. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

12. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar **Rp.275.053.000,-**.

Realisasi dana sebesar **Rp.216.471.000,- (78,70%)**.

a. Penyediaan Makanan

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.216.471.000,-

Realisasi dana sebesar Rp.216.471.000,- (78,70%).

III. TINGKAT PENCAPAIAN SPM

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota mempunyai urusan wajib yang mencakup 2 jenis Bidang pelayanan dasar yang dijabarkan dalam 5 pelayanan dasar bidang sosial yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang terdiri dari :
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti
 - b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti
 - c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti
 - d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
2. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota

Dari kelima jenis pelayanan dasar bidang sosial ini ditetapkan indikator dan nilai SPM, sebagai berikut :

1. Indikator dan Target SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian Tahun 2024	
			Nasional	Kabupaten
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	Presentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti	Presentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti,	Presentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti,	Presentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	100%	100%

Sumber data : Dinas Sosial tahun 2024

2. Realisasi Pencapaian SPM

Dari penetapan indikator SPM dan target SPM yang ada, pada Tahun Anggaran 2024 pencapaian SPM sebagai berikut :

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial
Tahun 2024

No	Indikator – SPM	Hasil/ Realisasi (A)	Target/ Sasaran (B)	A/B (%)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	40	40	100
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti	40	40	100
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	21	40	52,5
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	-	-	100
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota	9.537	10.500	90,83

Pencapaian SPM rata – rata sangat maksimal dan ada 2 capaian indikator tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu :

1. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota. Dimana Penyediaan makanan berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bagi korban bencana telah diganti dengan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang mana pengalokasiannya baik itu BNBA dan lokasinya ditentukan langsung oleh Kemensos
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti yang ditargetkan sebanyak 40 orang yang diperuntukkan bagi penyandang cacat maupun Lansia bedridden. Namun setelah dilakukan monitoring terdapat 21 orang lansia yang memenuhi kriteria penerima rehabilitasi sosial.

IV. OPD PENYELENGGARA URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Nama OPD : Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao
Unit Eselon : II
Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Ti'ilangga Permai
Jl. Lekunik – Ba'a Telp. (0380) 8571062

V. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

Keadaan jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta jumlah pejabat struktural dan fungsional pada Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao, terlihat pada tabel berikut :

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pengkat dan Golongan Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No	Tkt. Pend.	Jlh. Peg.	Golongan				Eselon					
			IV	III	II	I	II	III	IV	V	Fungsni	Non Esl
PNS/CPNS												
1.	S2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2.	S1	13	4	9	-	-	-	4	-	-	6	3
3.	Diplom a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SLTA	4	-	3	1	-	-	-	-	-	-	4
5.	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		18	5	12	1	-	-	5	-	-	6	7
Non PNS												
1.	S1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Diplom a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	SLTA	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VI. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao melaksanakan sektor pembangunan bidang kesejahteraan sosial berupaya untuk melaksanakan program sesuai kebutuhan Daerah. Keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial sangat ditentukan oleh kinerja Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao, karena itu perencanaan merupakan

faktor kunci dan awal keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan dalam berbagai bidang.

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh OPD dan permasalahan – permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan – kebijakan perencanaan di tahun – tahun mendatang.

Proses perencanaan dimulai dengan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta pencapaian tujuan dengan melalui kebijakan program untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan tetap memperhitungkan potensi dan kendala serta mengantisipasi tuntutan perkembangan masa depan. Penyusunan RENSTRA OPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dari RENSTRA OPD disusun RENJA untuk satu tahun yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) memuat Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan, sasaran dan target yang ingin dicapai serta plafon anggaran.

Dari Rencana Kerja yang telah ditetapkan disusun RKA-OPD dan DPA-OPD. Setelah penetapan DPA – OPD proses kegiatan dapat dilaksanakan.

V. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi ditentukan oleh kondisi sarana dan prasarana yang ada.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao sangatlah kurang sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

Kurangnya sarana dan prasarana terlihat seperti tidak tersedia aula/ruangan rapat, peralatan dan perlengkapan kantor yang terbatas seperti lemari arsip, Laptop dengan spesifikasi pendukung dan

perangkat jaringan yang memadai sehingga pengupdatetan data melalui jaringan internet bisa terkoneksi dengan baik, dll.

Kondisi sarana prasarana terlihat pada tabel berikut ini :

Data Asset Dinas Sosial, Keadaan Desember 2024

No	Jenis Aset	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin			
1.	Tower Crane	1 Unit	Kondisi Baik
2.	Station Wagon	1 Unit	Kondisi Baik
3.	Sepeda Motor	6 Unit	5 kondisi Baik dan 1 Rusak Berat
4.	AC	9 Unit	7 kondisi baik dan 2 rusak berat
5.	Mesin Ketik Manual	1 Unit	Kondisi Baik
6.	Brand Kas	1 Unit	Kondisi Baik
7.	Lemari Kayu	9 Unit	8 Kondisi Baik, 1 Kondisi rusak berat
8.	White Board	4 Unit	3 kondisi baik dan 1 rusak berat
9.	Rak Kayu	2 Unit	Kondisi Baik
10.	Meja Tulis	1 Buah	Kondisi rusak berat
11.	Meja Telpon	1 Buah	Kondisi Baik
12.	Kursi Rapat	14 Buah	9 Kondisi Baik dan 5 rusak ringan
13.	Meja Biro	2 Buah	1 Kondisi Baik dan 1 rusak berat
14.	Kursi Kerja	30 Buah	Kondisi Baik
15.	Gorden	56 Lembar	Kondisi Baik
16.	Wireless	1 Buah	Kondisi Baik
17.	Komputer PC	6 Buah	4 Kondisi Baik dan 2 rusak berat
18.	Laptop	29 Unit	24 Kondisi Baik dan 5 rusak berat
19.	Note Book	22 Unit	14 Kondisi Baik dan 8 rusak berat
20.	Printer	24 Unit	18 Kondisi Baik dan 6 rusak berat

21.	Scanner	2 Unit	Kondisi Baik
22.	Harddisk Eksternal	5 Buah	Kondisi Baik
23.	Meja Kerja	30 Buah	Kondisi Baik
24.	Camera	2 Unit	Kondisi Baik
25.	Proyektor	1 Unit	Kondisi Baik
26.	Handycam	1 Unit	Kondisi Baik
27.	Faximili	2 Unit	1 kondisi Baik dan 1 kondisi rusak
28.	Keyboard	2 Buah	Kondisi Baik
Gedung dan Bangunan Gedung			
28.	Bangunan Gudang	1 Unit	Kondisi Baik

Sumber Data : Dinas Sosial Tahun 2024

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024 :

- Alokasi anggaran yang terbatas
- Dalam penanganan kemiskinan OPD belum semua menggunakan data base kemiskinan
- Data kemiskinan belum valid dan sinkron untuk penanganan kemiskinan dimana kurangnya partisipasi dari desa/kel dalam penentuan operator desa untuk melaksanakan verifikasi data miskin (DTKS)
- Melemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena tidak adanya jaminan kepastian dalam merealisasikan berbagai rencana yang telah diusulkan
- Masih rendahnya kreativitas dan disiplin kerja pegawai
- Belum memadainya SOP bidang Kesejahteraan Sosial

2. SOLUSI

- Dilakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan
- Meningkatkan kerjasama antar OPD untuk menggunakan data base kemiskinan dalam pelaksanaan penanganan kemiskinan

- c. Setiap Desa/Kel wajib menentukan aparat desa yang bertugas sebagai operator desa dalam verifikasi data miskin (DTKS)
- d. Sosialisasi/penyuluhan pembangunan bidang kesejahteraan sosial terkait penyandang masalah kesejahteraan sosial beserta kriterianya
- e. Mengusulkan alokasi anggaran sesuai dengan program/kegiatan yang dilaksanakan
- e. Peningkatan sumber daya aparatur melalui pelatihan/bimbingan teknis

VI. P E N U T U P

Demikian LPPD Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao dari bulan Januari sampai Desember 2024 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ba'a, Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Rote Ndao,



R. Sjaiful W. Kusuma, A.Ks
NIP. 19670227 199201 1 001